

Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Dagang Pasca Pandemi Tahun 2023

Muhammad Raja Pramudita; Elli Ruslina; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000118@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: In the aftermath of the pandemic, there was a global recession due to the effects of the wars in Russia and Ukraine which caused inflation, deflation, bursting of asset bubbles, sudden economic shocks, technological developments, an imbalance between production and consumption, economic growth decreased for two consecutive quarters and the value of imports was higher. bigger than exports. Impact on the economic recession against the government both in trade and taxes of the country, Economic recession against companies. The research finding is that from a commercial law perspective, law is able to provide a procedural capability in resolving an economic recession. The writing on the Economic Recession and its Implications from the Commercial Law Perspective is a type of literature or library research. The steps carried out through the collection of data that are of a literary nature to explain the problem are based on a critical and in-depth study of the relevant library materials and then proceed with a critical analysis. The approach used is a normative, sociological and phenomenological legal approach that focuses on the analysis of the economic recession and its implications from the business law perspective that has occurred until now in Indonesia. An economic recession is a condition when the country's economy is deteriorating. Law can play a role in creating balance, because it relates to economic development initiatives. Law also plays a role in determining a clear definition and status (definition and clarity of status). In the end, the law must also be able to provide a clear definition and status regarding the consequences of social interaction and accommodate (accommodation) a clear balance for the interests of individuals or groups in society.

KEYWORDS: Recession; Economic; Implications; Law; Commercial Law.

ABSTRAK: Pada pasca pandemi terjadi resesi global efek dari peperangan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan inflasi, deflasi, pecahnya gelembung ekonomi, guncangan ekonomi yang tiba-tiba, perkembangan teknologi, ketidak seimbangan produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi melambat selama dua kuartal berturut-turut dan nilai impor lebih besar dari ekspor. Berdampak pada resesi ekonomi terhadap pemerintahan baik dalam perdagangan maupun pajak negara tersebut, Resesi ekonomi terhadap perusahaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang dapat menawarkan kesiapan prosedural untuk mengatasi resesi ekonomi dari sudut pandang hukum ekonomi. Menulis tentang resesi ekonomi dan dampaknya dari perspektif hukum bisnis adalah jenis literatur atau penelitian perpustakaan. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tertulis untuk mengklarifikasi masalah didasarkan pada pemeriksaan kritis dan menyeluruh terhadap bahan pustaka yang relevan kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis.

Pendekatan hukum normatif, sosiologis dan fenomenologis digunakan, yang berfokus pada analisis resesi ekonomi dan konsekuensinya dari sudut pandang yurisprudensi ekonomi yang diterbitkan di Indonesia selama ini. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi negara melemah. Pemerataan dapat memainkan peran dalam membangun keseimbangan yang berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga menyangkut definisi dan kejelasan status. Akhirnya, hukum juga harus mampu mendefinisikan dan mengambil posisi secara jelas atas akibat-akibat interaksi sosial dan menyesuaikan (akomodasi) pada keseimbangan yang jelas antara kepentingan individu atau kelompok di masyarakat.

KATA KUNCI: Resesi; Ekonomi; Implikasi; Hukum; Hukum Dagang

I. PENDAHULUAN

Pengertian resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara ketika aktivitas bisnis dan industri menurun, biasanya terjadi penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut. Arti kata resesi juga dapat diartikan sebagai perlambatan atau penurunan tajam dalam kegiatan ekonomi. Pengurangan besar dalam pengeluaran biasanya mengarah pada resesi. “Menurut penelitian Burhanuddin dan Abdi (2020) menunjukkan bahwa melihat perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri. Akan tetapi ekonomi juga bisa terdampak dari budaya dan kesehatan”.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri paling cepat terjadi pada tahun 1980, tumbuh 9,88 persen, dan penurunan terparah adalah -13,13 persen pada tahun 1998. Kondisi perekonomian terkini, ketika Indonesia terperosok dalam resesi, tampak pada pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar -3,49 persen setelah -5,32 persen pada triwulan II 2020 (y/y). Diukur berdasarkan industri, 64,13 persen PDB didominasi oleh industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Di sisi pengeluaran, rumah dan investasi menyumbang 88,43 persen.

Di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan memiliki prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat antara 4,5 hingga 5,3 persen pada tahun 2023 dan selanjutnya meningkat menjadi 4,7 hingga 5,5 persen pada tahun 2024, didukung oleh berlanjutnya konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang positif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan akan melambat dan kembali ke sasarannya sebesar $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024. Inflasi inti diperkirakan akan kembali lebih awal pada semester pertama tahun 2023, jika inflasi harga tetap di bawah Pengendalian impor (inflasi impor) pada nilai tukar rupee yang stabil dan respons kebijakan moneter yang berwawasan ke depan, berwawasan ke depan, dan berwawasan ke depan. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat

dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berdampak kuat terhadap pengendalian inflasi. Sinergi dan inovasi menjadi kunci kinerja perekonomian Indonesia tahun 2023 dan 2024 yang akan menopang ketahanan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Perry Warjiyo, Direktur Utama Bank Indonesia, pada Rapat Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang diselenggarakan dalam format hybrid di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. “Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati S.E. M.Sc Ph.D. menjelaskan berulang kali bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik- baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia”. “Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen”.

Berdasarkan data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UKM khususnya usaha mikro sangat besar dan kemampuan menyerap tenaga kerja sangat besar. Dari tahun ke tahun, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya, secara tidak langsung jumlah pengangguran juga berkurang. Masalah lain bagi UKM adalah ketergantungan mereka pada nilai dolar yang kecil. Sehingga naik turunnya nilai dolar di dunia tidak berdampak besar terhadap pergerakan UKM di Indonesia.

Selain itu, resesi ekonomi juga berpengaruh terhadap dinamika pembangunan yang dipicu oleh kemajuan pada trend global sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum, sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif terhadap pembangunan hukum. Pada realitas hukum yang ada, seberapa efektifkah undang-undang ITE dan peraturan hukum nasional Indonesia lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis mampu menjadi benteng pertahanan atas perilaku aktifitas-aktifitas dalam dunia maya. “Sebab aktifitas-aktifitas di dunia nyata sangat berbeda dengan aktifitas-aktifitas di dunia nyata, sehingga apakah hukum konvensional yang mengatur tata hubungan di dunia nyata dapat diterapkan untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya apalagi ketika melewati yuridiksi nasional (Alfana et al. 2017)”.

“Dari berbagai literature tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian secara nasional dan global bisa dibilang memprihatinkan bahkan di kalangan UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang cukup kuat tetap saja terjadi gejolak atau krisis dengan dampak yang begitu menyedihkan. Meskipun demikian UMKM bisa dibilang lebih bertahan ketimbang perusahaan besar lainnya, dikarena prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada lembaga lain (Syahputra 2020)”.

Penyebab terjadinya resesi terhadap perdagangan di Indonesia adalah Inflasi, kondisi naiknya harga secara terus menerus, baik harga barang maupun jasa dan berimbas melemahnya daya beli masyarakat yang ditakutkan dengan penurunan produksi barang dan jasa. Jika dibiarkan akan berdampak terhadap tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja secara masal, kemiskinan dan terjadi resesi. Deflasi berlebihan ditandai dengan adanya penundaan pembelian barang atau jasa sampai harga terendah dan beresiko terhadap pemilik usaha. Gelembung aset pecah, apabila investor mengambil langkah secara gegabah misalnya, terjadi pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harga akan naik dengan cepat kemudian keadaan ekonomi tengah goyah mereka akan beramai-ramai menjualnya

yang mengakibatkan terjadinya panic selling dan beujung pada resesi akibat rusaknya pasar. Munculnya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, hal ini mendorong terjadinya impor besar-besaran, membengkaknya pengeluaran perusahaan, dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama dua kuartal beturut-turut yang dinilai dari melemahnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Nilai impor lebih besar dari ekspor, memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional.

II. METODE

Penulisan tentang Resesi Ekonomi dan Implikasinya Perspektif Hukum Dagang ini adalah salah satu jenis penelitian literatur atau kepustakaan, khususnya jurnal. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tertulis untuk mengklarifikasi masalah didasarkan pada pemeriksaan kritis dan menyeluruh terhadap bahan pustaka yang relevan kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis. Pendekatan hukum normatif, sosiologis dan fenomenologis digunakan, yang berfokus pada analisis resesi ekonomi dan konsekuensinya dari sudut pandang yurisprudensi ekonomi yang diterbitkan di Indonesia selama ini (Susanto, 2015). Kemunduran ekonomi dan konsekuensinya dari sudut pandang hukum ekonomi terkait dengan model hukum Islam dan masyarakat, serta strategi para aktor dalam implementasi solusi ekonomi pasca pandemi, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan. dan kesejahteraan sosial. bagi bangsa Indonesia.

III. HASIL

Resesi ekonomi sebagai entitas ancaman "menurut (Hairunnisa 2020) menjelaskan bahwa dari potensi ancaman ekonomi dapat terjadi karena dua factor, baik eksternal maupun internal". Faktor eksternal memberikan peluang terhadap ancaman ekonomi seperti dampak perang dagang maupun sanksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara atau korporasi melalui pembatasan perdagangan, tarif atau embargo ekonomi. esesi ekonomi didefinisikan sebagai penurunan

yang signifikan dalam aktivitas ekonomi selama periode yang panjang dan stagnan dari bulan ke tahun. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan, peningkatan pengangguran, dan bahkan kebangkrutan finansial.

Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. “Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau bahwa Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A bahwa sebenarnya di penghujung tahun 2022 Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi tersebut”. “Sebenarnya saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi, ditandai dengan PHK besar – besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah air, berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun, ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang mereka ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting” ujar Detri.

Faktor terbesar yang menyebabkan Indonesia gagal terhindar dari resesi ekonomi 2023 berikutnya adalah distribusi barang dan jasa di masyarakat dan kekuatan uang, seperti fenomena belakangan ini bahwa nilai euro jatuh hampir sama dengan nilai mata uang. satu dolar , atau terkadang bahkan nilai dolar lebih tinggi dari euro. Selain hambatan tersebut, perang dingin yang mengguncang stabilitas beberapa negara, seperti antara Rusia dan Ukraina, juga akan mempengaruhi perekonomian dunia dan mempengaruhi negara lain, terutama negara berkembang seperti Indonesia, yang akan merasakan dampak resesi ekonomi yang lebih parah. cepat Dampak Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi adalah:

1. Ada kesenjangan antara kaya dan miskin dan semakin terlihat.
2. Jumlah pengangguran semakin meningkat, sehingga pemerintah harus mencari solusi agar perusahaan dapat mempekerjakan kembali tenaga kerja.

3. Pengeluaran pemerintah meningkat karena pembangunan harus dilanjutkan. Jadi salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah menambah utang untuk menutupi biaya pembangunan.
4. Untuk menekan biaya produksi yang tinggi di perusahaan, banyak pengusaha menerapkan kebijakan pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya

BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q3-2022 sebesar 1,81 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mencapai Rp.5.901,2 triliun harga berlaku dan Rp.2.976,8 triliun harga konstan pada triwulan III 2022. Berdasarkan catatan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5 %. Pada triwulan I tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen (y/y), namun mengalami kontraksi sebesar 0,95 persen (qtq). Angka pertumbuhan yang dibukukan BPS pada triwulan III 2022 tersebut jelas melampaui prakiraan beberapa lembaga ekonomi swasta di seluruh dunia yang hanya memprediksi pertumbuhan ekonomi negara pada triwulan tersebut hanya 1,66 persen. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,7 persen pada kuartal III 2022, sementara Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan lebih dari 5,5 persen. Angka tersebut juga bisa menjadi modal kuat perekonomian Indonesia menghadapi resesi global yang diperkirakan akan dimulai pada 2023. Menurut BPS, angka pertumbuhan triwulan III 2022 mencapai juta orang dan setengah pengangguran 8, sebesar 5 yaitu penurunan sebesar 2,88 juta orang. Di tengah gejolak perekonomian global yang belum juga mereda, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat di kisaran 5-5,3 persen pada 2023.

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-

5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Menurut Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut berpesan bahwa, ke depan, kondisi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. “Pada tahun 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme”, tambah Presiden Joko Widodo. Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

IV. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Bank Indonesia

Mendukung ketahanan perekonomian Indonesia yang telah dicapai selama ini, Dirut Bank Indonesia menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci bertahan di tengah gejolak global, sejalan dengan kepemimpinan Presiden RI. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu diperkuat, sekaligus memperhatikan merebaknya ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (perlambatan kegiatan ekonomi dan tingginya inflasi) bahkan reflasi (resesi ekonomi dan tingginya inflasi). . Ada risiko koreksi pertumbuhan ekonomi global dan di berbagai negara jika fragmentasi politik dan ekonomi yang tinggi berlanjut dan pengetatan moneter berlangsung lebih lama untuk menahan inflasi di masing-masing negara. Ekonomi dan keuangan digital juga akan tumbuh pada 2023 dan 2024, dengan nilai transaksi e-commerce

diperkirakan mencapai 572 triliun dan 689 triliun rubel, uang elektronik menjadi 508 triliun dan 640 triliun rubel, serta perbankan digital lebih dari 67.000 rubel dan 87 ribu triliun rubel. Sementara itu, terdapat 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu Kebijakan Stabilitas Makro, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan dan Kebijakan Ekonomi Keuangan Hijau dan Inklusif, yang masih menjadi pedoman dan bagian dari upaya bersama untuk mendorong ekonomi Nasional Pemulihan.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data dependent). Kebijakan makroprudensial yang longgar akan terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan UKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengembangkan ekonomi hijau dan inklusi keuangan. Berdasarkan Rencana Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, digitalisasi sistem pembayaran yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusantara akan lebih digalakkan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerjasama sistem pembayaran antar negara dan langkah-langkah. Tentang perkembangan rupiah digital seperti dalam “White Paper” yang juga akan disampaikan pada PTBI 2022. Program dukungan ekonomi dan keuangan untuk UKM dan keuangan syariah juga terus diperluas, misalnya melalui digitalisasi dan perluasan akses domestik dan pasar ekspor.

Dengan demikian Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia dan Komite Kebijakan Fiskal dan

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Pemerintah juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor dan inklusi ekonomi dan keuangan.

B. Kebijakan Penangan Resesi Ekonomi di Indonesia

Standar kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat mengacu kepada standar hidup atau nilai semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu perkapita.” Ukuran yang umum digunakan adalah output nasional per kapita, dengan standar konvensional yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Bisa dikatakan bahwa PDB adalah total produksi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah negara pada periode tertentu. Berbeda dengan GNP (Gross National Product) yang menghitung pendapatan dari warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, GDP tidak membatasi warga negara namun pendapatan riil di dalam negeri (domestik) tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan selama periode tertentu. Biasanya nilai GDP pada negara berkembang lebih besar dibandingkan GNP karena banyak investor asing yang menanamkan modalnya (Ali Ibrahim, 2016:38)”. “Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi berarti mencerminkan kapasitas produksi suatu negara, dengan beberapa indikator keberhasilan berupa (Yan Hanif, 2019:16)”:

1. Pendapatan nasional riil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Pendapatan per kapita riil meningkat dalam jangka panjang.
3. Kesejahteraan penduduk meningkat selama waktu tertentu.
4. Jumlah tenaga kerja dalam proses produksi meningkat.

Resesi adalah istilah yang mirip dengan krisis tetapi memiliki dampak yang lebih mendasar. Krisis ekonomi disebabkan oleh resesi ekonomi yang parah, inflasi yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan akan berlanjut menjadi resesi yang panjang. Resesi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, penyebabnya bisa berupa

fenomena mendadak atau inflasi yang tidak terkendali. Fenomena umum yang menyebabkan resesi adalah sebagai berikut:

1. Guncangan ekonomi yang tiba-tiba, biasanya disebabkan oleh peristiwa besar yang tidak terduga yang menyebabkan gangguan ekonomi yang meluas, mulai dari bencana alam hingga teroris. Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama di balik resesi tahun 2020 di berbagai negara.
2. *Over debt*, penambahan hutang menyebabkan kebangkrutan karena tidak mampu membayar.
3. *Real estate bubble*, dampak masuknya investor ke dalam negeri.
4. Inflasi terlalu tinggi karena pemerintah tidak dapat menstabilkan inflasi.
5. Deflasi yang berlebihan ketika harga turun, menyebabkan upah turun sesuai dengan itu.
6. Perubahan teknologi berdampak kuat pada fenomena ketenagakerjaan.

Resesi suatu negara biasanya dimulai dengan perlambatan ekonomi global, yang mempengaruhi ekonomi domestik, semakin tergantung pada ekonomi global, semakin cepat resesi melanda. Meski dampak resesi ekonomi global terhadap generasi resesi tidak dirasakan secara merata di berbagai negara, Indonesia termasuk negara yang merasakan dampaknya. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor produk pertambangan, bahan baku dan pasokan, lebih terpengaruh oleh resesi ekonomi global. Penurunan ekspor batu bara, kelapa sawit, karet atau barang lainnya dapat dilihat dari fakta bahwa perekonomian negara pengimpor mengalami kerusakan yang sama sehingga menyebabkan penurunan permintaan.

Mempertahankan daya beli dan pendapatan untuk menciptakan lapangan kerja akan sangat sulit jika dicapai dalam kondisi ekonomi yang melambat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang juga melambat sehingga menyebabkan turunnya permintaan global terhadap produk dalam negeri. Sambil menunggu

berakhirnya resesi ekonomi internasional, perekonomian domestik harus tetap dilanjutkan, karena tidak mungkin terjerumus ke dalam jurang depresi ekonomi. Kebijakan resesi ekonomi adalah suatu cara pencegahan terhadap perputaran uang secara global maupun domestik yang secara berlebihan mengakibatkan inflasi maupun deflasi. Kebijakan resesi ekonomi terhadap hukum dagang dapat dicegah ke pada arah yang lebih baik sebagai berikut :

1. Belanja besar-besaran oleh Pemerintah, mengapa demikian agar memperkuat daya beli sehingga perputaran ekonomi tidak macet dan dunia usaha atau perdagangan terus bergerak dan berinvestasi.
2. Bantuan terhadap UMKM, dengan menyalurkan bantuan terhadap UMKM berupa UMKM produktif dan kredit bunga rendah, direlasasikan terhadap roda perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik.
3. Menarik kepercayaan Investor, cara pencegahan resesi adalah membuat kebijakan yang efektif dan diharapkan mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Melunasi Hutang yang ada, usahakan untuk lebih konservatif terhadap hutang, khususnya berhutang untuk tujuan konsumtif. Debt service rasio yang sehat yaitu dibawah 30% dari penghasilan bulanan.

V. KESIMPULAN

Menurut Universitas Islam Riau (FEB), Guru Besar Fakultas Ekonomi Prof. dr. H. Detri Karya, S.E., M.A, bahwa sebenarnya di penghujung tahun 2022 ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi “Bahkan saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi yang ditandai dengan PHK massal di salah satu e- negara-negara perdagangan, jadi secara tidak langsung, PHK para pekerja ini karena turunnya daya beli masyarakat dan kenaikan harga BBM, itulah yang menyebabkan masyarakat menabung dan menabung daripada

membeli barang-barang yang tidak perlu terlalu penting,” ujar Detri. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat di kisaran ,5-5,3 persen pada 2023 dan terus tumbuh di kisaran ,7-5,5 persen pada 2023, ditopang berlanjutnya konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang positif di tengah pertumbuhan global yang melambat. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan akan melambat dan kembali ke $3,0\pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024. Inflasi inti diperkirakan akan pulih pada paruh pertama tahun 2023 jika inflasi harga tetap terkendali. terhadap impor (inflasi impor) dengan nilai tukar rupee yang stabil dan respons kebijakan moneter yang berorientasi pada bunga, berwawasan ke depan dan berwawasan ke depan. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Inflasi Pangan Nasional (GNPIP) berdampak kuat pada pengendalian inflasi. Dalam formula politik, masih diperlukan penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menghasilkan kebijakan ekonomi negara yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara dengan memperkuat kesinambungan dan revitalisasi ekonomi nasional. Optimisme pemulihan ekonomi harus diperkuat, dengan tetap mewaspadaai ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (perlambatan ekonomi dan tingginya inflasi) bahkan reflasi (resesi dan inflasi tinggi). Ekonomi dan keuangan digital akan terus tumbuh pada 2023 dan 2024, dengan transaksi e-commerce diperkirakan mencapai Rp.572 triliun dan Rp.689 triliun, uang elektronik mencapai Rp.508 triliun dan Rp.60 triliun, dan digital banking melebihi Rp.67ribu dan Rp87 ribu triliun.

Pada saat yang sama, (empat) kebijakan Bank Indonesia, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi keuangan yang hijau dan inklusif, akan terus berlanjut dan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan ekonomi. ekonomi Nasional. percepatan pertumbuhan). Kebijakan makroprudensial yang longgar terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan UKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengembangkan ekonomi hijau

dan inklusi keuangan. Kebijakan Sistem Pembayaran Berdasarkan Rencana Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI), digitalisasi sistem pembayaran dalam satu bahasa, satu negara, dan satu nusantara akan terus digalakkan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran lintas batas, dan pengembangan tahapan rupiah digital, sebagaimana tertuang dalam buku putih yang diterbitkan di PTBI 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Pemerintah juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor dan... mendukung integrasi ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti juga mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti data yang digunakan dalam penelitian masih terbatas pada hasil penelitian sebelumnya dan berbagai literatur yang dipublikasikan di media. Diharapkan para peneliti selanjutnya dapat membuat sumber data yang lebih kompleks dan data pendukung lainnya untuk memberikan solusi hukum yang lebih tepat terhadap ancaman resesi ekonomi. dan mendapatkan kepastian agar masyarakat Indonesia sejahtera dalam perekonomian yang baik dalam perdagangan maupun pajak negara.

DAFTAR REFERENSI

Adhari, Agus. 2020. "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12(1): 31–48.

Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152.

Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2): 83–92

Heliandy, Ina (2021), Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia, *Prosiding Seminar Stiarni*, Vol. 8 No. 1

Rumokoy, Nike K. 2010. "Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 18(5): 14–28.

Susanto, Anthon F., 2015, *Metode Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*.

Soemartini, Soemartini. 2020. "Stimulus Perekonomian Di Tengah Krisis Ekonomi Lokal Dan Global Akibat Merebaknya Covid 19." *Journal Biostatistics | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran* (1).

Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 384–88.

ITS, 2022, <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/> Diakses pada tanggal 07-Desember-2022 Pukul 21.30 WIB

UIR, 2022, <https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html> Diakses pada tanggal 07-Desember-2022 Pukul 21.45 WIB

Kementrian Pertahanan, 2022,
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-kebal-resesi> Diakses pada tanggal 07-Desember-2022 Pukul 21.50
WIB

Bank Indonesia, 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx Diakses pada tanggal 07-Desember-2022 Pukul 22.00